



REVISI RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN PETERNAKAN PESISIR SELATAN - SUMATERA BARAT 2016-2021



PAINAN, 12 Oktober 2017

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Rencana Strategis Pembangunan Peternakan merupakan salah satu bagian penting dari upaya untuk menyukseskan agenda pembangunan daerah sesuai dengan amanah RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Melalui Rencana strategis ini diharapkan dapat dilaksanakan pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan Renstra ini : Pertama, Memformulasikan program dan kegiatan prioritas pembangunan peternakan; Kedua, Merumuskan kebutuhan pembiayaan (indikasi pendanaan); dan Ketiga, Menyusun mekanisme pelaksanaan pembangunan peternakan. Pendekatan kajian dilakukan dengan mengkombinasikan pendekatan deduktif dengan kajian konseptual dengan menelaah RPJMD, Renstra Kementerian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Melakukan evaluasi terhadap capaian indikator renstra sebelumnya, dan pendekatan induktif dengan kajian teknis dan empiris di 15 kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan kinerja pembangunan peternakan dan kesehatan hewan setiap tahunnya dapat berjalan lancar sesuai dengan visi Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan “Terwujudnya Masyarakat Peternakan Yang Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Painan, 12 Oktober 2017



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
 BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN DINAS	11
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	
Kabupaten Pesisir Selatan	
2.2. Sumber Daya Peternakan dan Kesehatan	19
Hewan di Kabupaten Pesisir Selatan	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan	
Kesehatan Hewan	22
2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan	
Pelayanan Dinas Peternakan dan	29
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir	
Selatan	
 BAB III	
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	31
POKOK DAN FUNGSI	

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	35
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Pertanian, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	48
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis Pembangunan Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan	50
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	52
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat	52
4.2. Strategi dan Kebijakan	59
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF	60
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Wilayah	60

BAB VI	INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	70
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN	72
BAB VIII	PENUTUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 (%)	24
Tabel 2	Sebaran Penduduk Pesisir Selatan berumur 10 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2016	25
Tabel 3	Indikator Kinerja Utama	53
Tabel 4	Daftar Target Kinerja Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	55
Tabel 5.	Daftar Target Capaian Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	58
Tabel 6.	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah kabupaten yang terletak di pantai barat bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini merupakan pintu gerbang masuk di wilayah selatan Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Barat. Secara Administrasi, saat ini terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari pemerintah. Awalnya Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 256 desa, kemudian terdapat perubahan nama desa menjadi nagari, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 182 Nagari. Seiring dengan perubahan waktu pemerintah daerah terus melakukan perubahan jumlah dan luas wilayah nagari sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Sejarah perubahan tersebut mulai dari 182 nagari berubah menjadi 36 nagari adat kemudian berubah lagi menjadi 37 nagari adat, dan terus berubah dari nagari adat menjadi nagari pemerintah yang berjumlah 96 menjadi 102 nagari sampai akhirnya kembali menjadi 182 nagari pemerintah.

Secara geografis Kabupaten Pesisir Selatan terletak pada titik koordinat $0^{\circ} 59' 00''$ LS sampai $2^{\circ} 28,6' 00''$ LS dan $100^{\circ} 19' 00''$ BT sampai $101^{\circ} 18' 00''$ BT. Bagian utara berbatasan dengan Kota Padang, bagian selatan berbatasan dengan

Kabupaten Muko-Muko, bagian barat berbatasan dengan Samudera Hindia, dan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Solok Selatan, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 579,495 hektar yang terdiri dari kawasan hutan lindung sebesar 279,533 hektar atau 54,39 Persen dan kawasan budidaya sebesar 299,692 hektar atau 45,61 Persen. Jumlah pulau 47 buah dan garis pantai 234,2 kilometer.

Secara geologis Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling berdesakan sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang air laut yang tinggi atau tsunami. Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan bencana alam dan gempa bumi terjadi karena letak geografis daerah ini yang terletak pada pertemuan lempeng benua. Tanah longsor dan banjir lebih diakibatkan karena sifat fisik dan tutupan lahan seperti kawasan hutan yang semakin berkurang. Selama ini bencana alam menjadi kendala dalam upaya pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan budidaya yang dioperasionalkan melalui kawasan strategis telah dituangkan dalam RPJMD melalui visi

Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, Dan Sejahtera. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri dengan beberapa sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Sasaran, strategi dan arah kebijakan pertama yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan melalui strategi mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna; dan meningkatkan ketersediaan dan keanekaragaman pangan.

Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan peternakannya. Hal ini didukung dengan populasi ternak yang cukup sebagaimana data Statistik Peternakan tahun 2016 yaitu ; sapi potong 80.976 ekor, kerbau 8.430 ekor, kambing 40.451 ekor, ayam buras 780.056 ekor, ayam ras petelur 96.700 ekor, ayam ras pedaging 2.105.000 ekor dan itik 154.050 ekor.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak, Pembangunan Peternakan dan Kesehatan

Hewan Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah komoditas peternakan.

Peningkatan produksi, nilai tambah dan peningkatan daya saing produk peternakan dilaksanakan melalui pendekatan pembangunan secara *holistik-tematik, integratif dan spasial*. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan peternakan dapat berjalan secara menyeluruh, sesuai dengan fokus pembangunan daerah, terintegrasi dengan komoditi lainya dan sesuai dengan tata ruang.

Guna menjaga arah dan kebijakan pembangunan peternakan, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

6. *Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008*
7. *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025*
8. *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030*
9. *Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah*
10. *Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021*
11. *Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2020.

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, adalah ;

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan pimpinan, staf dan karyawan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 sekaligus mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, staf dan karyawan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan dan staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan; mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 .Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

4.2. Strategi dan Kebijakan (Prioritas Wilayah)

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan (Prioritas Wilayah)

5.2. Pendanaan Indikatif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan terbentuklah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebagai Dinas maka kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah:

a. Kedudukan

1. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah unsur pemerintah daerah dibidang peternakan dan kesehatan hewan
2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang peternakan dan Kesehatan Hewan
- d) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Susunan Organisasi

Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

2) Sekretariat

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

3) Bidang Produksi Peternakan

- a) Seksi Perbibitan*
- b) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan*
- c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak*

4) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a) Seksi Kesehatan Hewan*
- b) Seksi Kesehatan masyarakat Veteriner*
- c) Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan dan Sarana Medik*

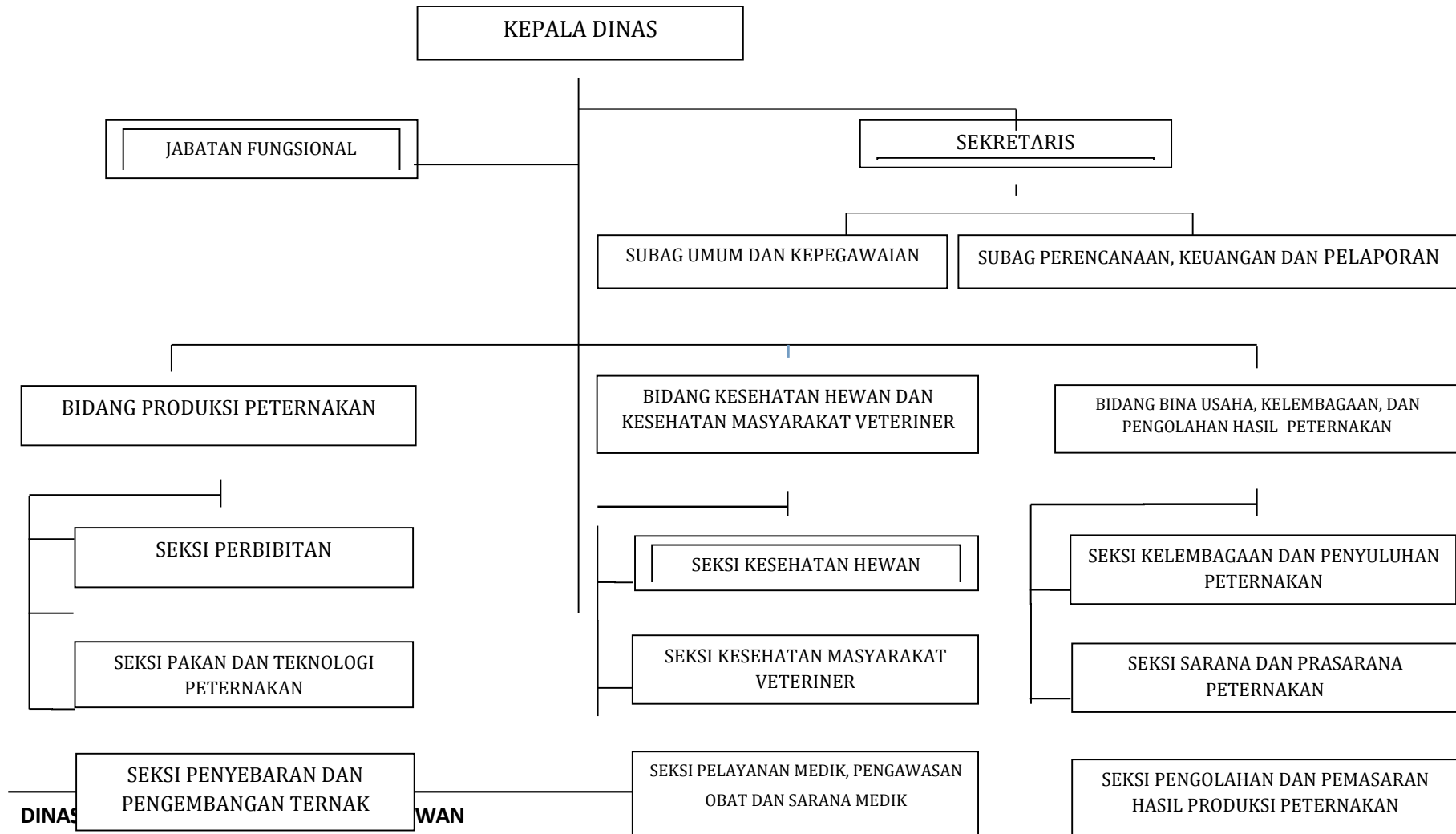
5) Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan

- a) Seksi Kelembagaan dan Penyuluh Peternakan*
- b) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan*
- c) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan*

6) Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN





UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

(sumber : Perda Kab. Pessel Nomor 8 tahun 2016)

Gambar 1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
- d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian umum dan kepegawaian: mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, rumah tangga, administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, kehumasan dan protokol serta penataan barang milik negara di lingkungan Dinas.*
 - b. Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan keuangan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan*
- 2. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner*

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. *Perencanaan operasional kegiatan bidang Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;*
- b. *Pengkoordinasian kegiatan bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner;*
- c. *Pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;*
- d. *Pembagian pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan*
- e. *Pengawasan pelaksanaan tugas urusan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.*

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :

- a. *Seksi Kesehatan Hewan; mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis penyiapan bahan, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan*
- b. *Seksi Kesehatan masyarakat veteriner ; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan eesehatan Masyarakat Veteriner merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi*

dan melaporkan urusan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- c. *Seksi Pelayanan Medik, Pengawasan Obat Hewan, dan Sarana Medik*; mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pelayanan medik, pengawasan obat dan Sarana Medik Hewan.

3. *Bidang Produksi Peternakan*

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan, pakan dan teknologi peternakan serta penyebaran dan pengembangan ternak

Bidang Produksi Peternakan terdiri dari :

- a. *Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan*; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pakan dan Teknologi Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pakan dan Teknologi Peternakan

- b. *Seksi Perbibitan*; mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang produksi peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbibitan ternak
 - c. *Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak*; mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Produksi Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Penyebaran dan Pengembangan Ternak
4. *Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan*

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan di bidang budi daya, produksi, sarana prasarana peternakan, pakan, teknologi, penyuluhan peternakan,

bina usaha, serta pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan*
- b. Pengkoordinasian kegiatan seksi di bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan*
- c. Pelaksanaan kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan*
- d. Pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang Bina Usaha, Kelembagaan, Pengolahan Hasil Peternakan
Pembagian pelaksanaan tugas bidang peternakan*
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan fungsinya*

Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan hasil Peternakan terdiri dari :

- a. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan; mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan.*

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan merencanakan kegiatan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Hasil Peternakan.

c. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang Bina Usaha, Kelembagaan dan Pengolahan Hasil Peternakan melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Sarana Prasarana Peternakan.

5. Unit Pelaksana Teknis

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka dilingkungan Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Pesisir Selatan

1. Keadaan Sumber Daya Alam (Ternak dan Lahan)

- a. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan produsen sapi terbesar di Sumatera Barat serta memiliki ternak yang beragam seperti kerbau, ayam buras, itik dan kambing.
- b. Meskipun baru pada tahap usaha sampingan, sebagian besar masyarakat/petani mengusahakan ternak.
- c. Masih banyak lahan terlantar yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan
- d. Limbah Pertanian seperti padi dan jagung belum dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak.

2. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Sumber Daya Aparatur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Aparatur Sipil Negara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari 25 orang PNS (Tenaga Administrasi) dan 24 orang PNS yang bertugas sebagai tenaga teknis lapangan (ditempatkan di Kecamatan), serta 25 orang tenaga honor/sukarela dengan klasifikasi;

- 1) Berdasarkan golongan ruang

- a) Golongan IV : 5 orang
- b) Golongan III : 31 orang
- c) Golongan II : 5 orang
- d) Honorer (setara gol II) : 25 orang

2) Berdasarkan pendidikan

- a) Pasca Sarjana : 4 orang
- b) Dokter Hewan : 7 orang
- c) Sarjana peternakan : 20 orang
- d) D3 : 1 orang
- e) SLTA : 10 orang

3) Berdasarkan jabatan

- a) Eselon II : 1 orang
- b) Eselon III A : 1 orang
- c) Eselon III B : 3 orang
- d) Eselon IVA : 11 orang
- e) Medis lapangan : 5 orang
- f) Paramedis : 16 orang
- g) Inseminator : 22 orang
- h) Tenaga administrasi : 33 orang

- i) Tenaga kebersihan : 1 orang
- j) Penjaga kantor/malam : 2 orang
- k) Sopir : 2 orang
- l) Satpam : 1 orang

b. Rumah Tangga Pemelihara (RTP) Ternak

Jumlah RTP peternak di Kabupaten Pesisir Selatan adalah RTP ternak sapi potong 30.588 KK, RTP ternak kerbau 2.770 KK, RTP ternak kambing 6.084 KK, RTP ternak ayam buras 61.145 KK, RTP ternak ayam ras petelur 17 KK, RTP ternak ayam ras pedaging 62 KK, RTP dan ternak itik 7.891 KK

c. Kelembagaan Peternak

Kelembagaan peternak di Pesisir Selatan terdiri dari kelompok tani ternak. Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 501/560/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Penetapan kelompok tani di Lingkungan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 499 kelompok tani ternak dengan klasifikasi sebagai berikut; kelompok pemula 150 kelompok, kelompok lanjut 169 kelompok, kelompok madya 175 kelompok dan kelompok utama 5 kelompok.

Disamping itu terdapat 50 kelompok inti plasma Farm Kemitraan ayam potong.

3. *Keadaan Sumber Daya Buatan (SDB)*

- a. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) terdiri dari 6 Unit (Puskeswan Tarusan, Puskeswan Painan, Puskeswan Sutera, Puskeswan Padang Laban, Puskeswan Inderapura dan Puskeswan Lunang);
- b. Rumah Potong Hewan (RPH Painan), 1 unit ;
- c. Pos IB sebanyak 20 unit, terdiri dari 1 unit Pos IB di Kec. Koto XI Tarusan, 2 unit di Kec. Bayang, 1 unit di Kec. IV Nagari Bayang Utara 4 unit di Kec. IV Jurai, 1 unit di Kec. Batang Kapas, 2 unit di Kec. Sutera 2 unit di Kec. Lengayang, 2 unit di Kec. Ranah Pesisir, 2 unit di Kec. Linggosari Baganti, 2 unit di Kec. Pancung Soal, dan 1 unit di Kec. Lunang dan Silaut;
- d. Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4), terdiri dari 2 unit (P4 Lengayang seluas 10 Ha dan P4 Air Haji seluas 5 Ha);
- e. Pasar Ternak 1 unit yaitu Pasar Ternak Lengayang;
- f. Alat mesin peternakan, terdiri dari adalah Chopper 7 unit, Alat USG 2 unit, biogas 5 unit, GPS 4 unit, pengukur suhu 1 unit;
- g. Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) sebanyak 13 unit tersebar di seluruh Kecamatan.

4. *Keadaan Sumber Daya lainnya*

- a. *Teknologi reproduksi aplikatif berupa Inseminasi Buatan (IB) di bidang peternakan*
- b. *Teknologi pengolahan limbah peternakan (bio gas dan pupuk organik) sebagai teknologi aplikatif untuk pemanfaatan limbah peternakan sebagai sumber energi dan pupuk organik.*

2.3. *Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan*

Kinerja pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat dinilai dari dua aspek yaitu : Kinerja aspek makro ekonomi yang menyangkut kontribusinya terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja, investasi, perdagangan peternakan dan kesehatan hewan, dan indikator kesejahteraan masyarakat. Selain kinerja aspek ekonomi, pelayanan peternakan dan kesehatan hewan juga dapat dinilai dari kinerja aspek teknis yang meliputi populasi, produksi, dan konsumsi produk asal hewan.

1. *Kinerja Makroekonomi*

Peternakan merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun kontribusi tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif

bagi pelaksanaan pembangunan dan sinergitas dengan sektor lain.

Pembangunan peternakan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat petani ternak. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan inovasi teknologi tepat guna, peningkatan produksi ternak, peningkatan sumber daya masyarakat peternak, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi mendukung usaha peternakan, serta penataan dan pengembangan kelembagaan usaha peternakan.

Keberhasilan pembangunan peternakan sangat ditentukan oleh empat faktor utama penggerak pembangunan peternakan yaitu ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam (lahan dan ternak), teknologi dan kelembagaan. Keempat faktor penggerak pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara sinergis dan terintegratif, secara menyeluruh (holistik), secara tematik, dan mempertimbangan tata ruang (spasial) untuk mencapai pembangunan peternakan yang berkualitas, peningkatan produksi peternakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesisir Selatan tercermin dari kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan struktur ekonomi pembentuk PDRB, perekonomian Kabupaten

Pesisir Selatan didominasi oleh 4 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan, industri pengolahan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Sumbangan Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 (%)

NO	LAPANGAN USAHA	Kontribusi (%)
1.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	41,65
2.	Industri Pengolahan	8,06
3.	Konstruksi	9,42
4.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,23
5.	Pertambangan dan penggalian	4,14
6.	Pengadaan listrik dan gas	0,05
7.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07
8.	Transportasi dan pergudangan	3,71
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,09
10.	Informasi dan komunikasi	5,53
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,33
12.	Real estate	1,42
13.	Jasa-jasa	11,31
	PDRB	100,00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 1 di atas, terlihat bahwa sektor pertanian merupakan sektor menyumbang terbesar kepada PDRB Kabupaten Pesisir Selatan (41,65 %), yang terdiri dari sub sector Pertanian, Peternakan, Perburuan dan jasa pertanian, kehutanan dan penebangan kayu dan perikanan.

Sementara itu, sektor pertanian merupakan sektor yang berkontribusi besar dalam memberikan lapangan kerja bagi penduduk Pesisir Selatan. Hal ini dapat dilihat dari struktur penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan Pekerjaan Utama sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran Penduduk Pesisir Selatan berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama tahun 2016

NO	PEKERJAAN UTAMA	JUMLAH PENDUDUK	
		(JIWA)	(%)
1.	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	75.603	48,50
2.	Industri pengolahan	8.342	5,35
3.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan Hotel	24.079	15,45
4.	Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan	28.750	18,44
5.	Lainnya	19.120	12,26
	Jumlah	155.894	100.00

Sumber : Pesisir Selatan Dalam Angka Tahun 2016

Berdasarkan tabel 2 diatas diketahui bahwa sektor pertanian merupakan pekerjaan utama bagi 75.603 jiwa Pesisir Selatan (48,50%). Sementara secara total, jumlah rumah tangga peternak (RTP) di kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 mencapai 108.557 RTP. Dengan demikian, maka sektor peternakan secara umum merupakan sub sektor yang memberikan lapangan kerja bagi petani dan menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi rakyat.

2. Kinerja Teknis

a. Populasi Ternak Tahun 2016

NO	JENIS TERNAK	POPULASI (EKOR)
A.	Ternak Besar dan Kecil	
1	Sapi	80.976
2	Kerbau	8.430
3	Kambing	40.451
B.	Ternak Unggas	
1	Ayam Buras	780.056
2	Ayam Ras Petelur	96.700
3	Ayam Ras Pedaging	2.105.000
4	Itik	154.050

b. Jumlah Ternak yang di Potong Tahun 2016

NO	JENIS TERNAK	JUMLAH (Ekor)
A.	Ternak Besar dan Kecil	
1	Sapi	5.477
2	Kerbau	170
3	Kambing	1.723
B.	Unggas	
1	Ayam Buras	1.336.460
2	Ayam Ras Petelur	58.205
3	Ayam Ras Pedaging	2.069.605
4	Itik	74.729

c. Produksi Daging dan Telur dan Produktivitas Ternak Tahun 2016

N O	JENIS TERNAK	PRODUKSI (Kg)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ekor)
A.	Daging		
1	Sapi	1.045.286	190,85
2	Kerbau	37.878	222,81
3	Kambing	38.145	22.14
4	Ayam Buras	955.569	0,715
5	Ayam Ras Petelur	70.552	0,825
6	Ayam Ras Pedaging	2.508.612	0,825
7	Itik	90.581	0,825
B.	Telur		
1	Ayam buras	498.261	1,4
2	Ayam Ras Petelur	745.557	10,6
3	Itik	845.734	7,6

d. Tingkat Kelahiran dan Kematian Ternak Tahun 2015

NO	JENIS TERNAK	TINGKAT KELAHIRAN		TINGKAT KEMATIAN	
		(Ekor)	%	(Ekor)	%
A.	Ternak Besar dan kecil				
1	Sapi	11.187	13,9 6	533	0,67
2	Kerbau	867	10,4 8	235	2,84
3	Kambing	2421	5,81	641	1,54

NO	JENIS TERNAK	TINGKAT KEMATIAN	
		(Ekor)	%
	Unggas		
1	Ayam Buras	15.206	1,95
2	Ayam Ras Petelur	2.498	2,93
3	Ayam Ras Pedaging	6.393	1,16
4	Itik	4.692	3.17

3. Kinerja Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan di Dinas Peternakan Kabupaten Pesisir Selatan meliputi :

- a. Pelayanan inseminasi buatan; merupakan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas bibit ternak terutama ternak sapi dan kerbau. Dengan teknologi ini diharapkan produktifitas ternak dapat meningkat dimana dengan ternak lokal berat hidup ternak sapi siap potong hanya mencapai paling tinggi 350 kg, sedangkan ternak hasil inseminasi buatan berat badannya dapat mencapai 600 kg sampai dengan 800 Kg. Realisasi pelayanan Inseminasi Buatan pada tahun 2016 mencapai 5.643 ekor
- b. Pemeriksaan Kebuntingan; merupakan pelayanan lanjutan dari Inseminasi Buatan dimana ternak yang telah di lakukan Inseminasi Buatan minimal 2 bulan perlu dilaksanakan Pemeriksaan kebuntingan (PKB)

untuk mengetahui ternak tersebut sudah bunting atau belum. Dengan demikian peternak segera tahu dan yakin bahwa ternak yang dipelihara sudah bunting atau belum. Pada tahun 2016 jumlah ternak yang di PKB adalah 4.452 ekor.

- c. Pelayanan kesehatan hewan; merupakan pelayanan medik maupun paramedik veteriner baik yang dilakukan oleh Dokter Hewan di Pos Kesehatan hewan maupun oleh Petugas teknis peternakan yang ada di Kecamatan. Pelayanan ini bersifat aktif maupun pasif, dimana untuk pelayanan aktif petugas memberikan pelayanan percontohan sedangkan yang pasif sesuai dengan permintaan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pada tahun 2016 jumlah pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 78.845 ekor.
- d. Penanganan gangguan reproduksi; merupakan masalah yang cukup penting untuk diatasi karena bila ternak mengalami gangguan reproduksi akan sulit untuk bunting dan melahirkan anak, keadaan ini akan menurunkan jumlah kelahiran ternak yang pada gilirannya juga akan menurunkan produktifitas ternak. Banyak faktor yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan reproduksi antara lain karena pemberian pakan yang kurang berkualitas maupun karena perawatan pasca melahirkan yang tidak baik.

Kesadaran peternak untuk memeriksakan ternaknya yang mengalami kesulitan bunting ini masih rendah, peternak cenderung menjual ternaknya bila dikawinkan beberapa kali tidak segera bunting. Oleh sebab itu pelayanan ini cenderung bersifat aktif dimana petugas harus sering memberikan percontohan untuk menangani gangguan reproduksi. Pada tahun 2016 jumlah penanganan gangguan reproduksi sebanyak 1.226 ekor.

- e. Pelayanan Rumah Potong Hewan; Pemotongan hewan/ ternak merupakan kegiatan yang harus dikontrol dan diawasi oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan karena proses pemotongan hewan berpotensi menularkan penyakit yang bersifat Zoonosis (menular dari ternak ke manusia), disamping itu juga agar dapat tersedia daging yang higienis dan berkualitas baik. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 1(satu) unit rumah potong hewan (RPH) yang melayani pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan daging di kota Painan. Regulasi yang mengatur retribusi RPH adalah Perda No. 2 tahun 2012 tentang retribusi Jasa Usaha. Jumlah pemotongan ternak tahun 2016 di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 5.647 ekor.
- f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH); Pelayanan penerbitan SKKH dilakukan oleh tenaga medis veteriner (drh), dengan tujuan untuk menjamin

kepastian Kesehatan Hewan dan produk asal hewan yang masuk dan keluar dari dan ke Pesisir Selatan. Pelayanan dilakukan dengan melakukan pengecekan surat kesehatan hewan dari petugas peternakan/dokter hewan dan petugas cek point. Kabupaten Pesisir Selatan saat ini menyelenggarakan 2 cek poin yaitu Siguntur dan Silaut. Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan dari Pesisir Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Ternak sapi : 131 SKKH
- 2) Ternak Ayam : 204 SKKH
- 3) Ternak kerbau : 9 SKKH
- 4) Telur : 17.500 Kg dengan 5 SKKH
- 5) Daging babi : 21 SKKH
- 6) Burung : 22 SKKH
- 7) Anjing : 3 SKKH

Secara umum gambaran Kinerja Pelayanan Peternakan yang dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	REALISASI
1	Inseminasi Buatan	5.643 dosis
2	Pemeriksaan Kebuntingan	4.452 ekor
3	Pelayanan Kesehatan Hewan	78.845 ekor

4	Penanganan Gangguan Reproduksi (ATR)	1.226 ekor
5	Pemotongan Hewan	5.647 ekor
6	Surat Keterangan Kesehatan Hewan	
	Ternak sapi	131 SKKH
	Ternak ayam	204 SKKH
	Ternak kerbau	9 SKKH
	Telur	5 SKKH
	Daging babi	21 SKKH
	Burung	22 SKKH
	Anjing	3 SKKH

2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Peluang

- Kerjasama regional segitiga pertumbuhan (IMS – GT dan IMT–GT) yang melibatkan Sumatera Barat sangat berpeluang kerjasama (MOU) di sub sektor peternakan baik dalam bentuk investasi maupun pemasaran produksi peternakan.
- Pertambahan penduduk yang semakin besar akan mendorong peningkatan kebutuhan pangan, khususnya hewani.
- Semakin tingginya sumberdaya manusia masyarakat melalui jalur pendidikan formal khususnya ilmu peternakan akan membuka peluang untuk mengembangkan subsektor peternakan.

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebutuhan sumber protein hewani yang ASUH
- e. Daya tarik masyarakat untuk melakukan usaha peternakan yang berpeluang memberikan penghasilan lebih sekaligus membuka peluang kerja
- f. Permintaan terhadap sapi qurban yang meningkat setiap tahun

2. *Tantangan*

- a. Konsumsi produk hewan meningkat;
- b. Keunggulan kompetitif masih rendah
- c. harga sarpras produksi peternakan masih tinggi;
- d. Peningkatan risiko penyakit hewan strategis dan zoonosis;
- e. Persaingan kompetensi tenaga peternakan dan kesehatan hewan dalam penguasaan teknologi terbaru;
- f. Kualitas SDM rendah;
- g. Kualitas pelayanan veteriner (Veterinary Services) rendah;
- h. Masalah Otonomi Daerah (adanya kesenjangan kelembagaan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Pusat dan Daerah).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pembangunan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dihadapkan pada berbagai permasalahan :

1. Bidang Sumber Daya Manusia

- a. Keterbatasan jumlah tenaga teknis peternakan. Dalam pelayanan peternakan dibutuhkan ketersediaan tenaga teknis peternakan sebagai pelayan teknis dan agen pembaruan informasi dan aplikasi teknologi dalam pembangunan peternakan. Kondisi SDM teknis yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini adalah;

- 1) Tenaga medis sebanyak 7 (tujuh) orang 2 (dua) orang diantaranya menjabat sebagai pejabat struktural. Secara teknis, kebutuhan tenaga medis untuk mengelola 6 (enam) unit puskesmas, 2 (dua) unit perbibitan, 1 (satu) unit Pasar Ternak dan 1 (satu) unit Tempat Pemotongan Hewan dibutuhkan tenaga medis veteriner (Dokter hewan) sebanyak 15 orang diluar yang menduduki jabatan struktural.

- 2) Paramedis veteriner, 22 orang sebagian besar masih merangkap sebagai inseminator, PKB, dan ATR
- 3) Tenaga labor kesehatan hewan, sampai saat ini belum ada
- 4) Tenaga labor kesehatan masyarakat veteriner, sampai saat ini belum ada.
- 5) Juru Keswan, belum ada
- 6) vaksinator, 21 orang yang sekaligus bertindak sebagai tenaga paramedis veteriner.
- 7) *Keur Master* pemotongan ternak, 3 orang.
- 8) Pengawas mutu pakan, (belum ada)
- 9) Pengawas mutu bibit, (belum ada)
- 10) Inseminator, ada 25 orang petugas yang terdiri dari 23 orang sudah memiliki Surat Izin Melaksanakan Inseminasi (SIMI), 17 orang diantaranya inseminator aktif dan 5 orang tidak aktif. Dari 5 orang inseminator yang tidak aktif, 3 orang sebagai pejabat struktural, 2 orang di kecamatan) idealnya dengan luasnya wilayah jangkauan IB dan potensi akseptor sebanyak 26.000 ekor dibutuhkan inseminator sebanyak 35 orang.
- 11) Pemeriksa kebuntingan (PKB), ada 11 orang (2 orang merangkap struktural). Idealnya satu Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang PKB

12) Asisten teknis reproduksi (ATR), ada 3 orang. Idealnya Idealnya dua Satuan Pelaksana Inseminasi Buatan (SP-IB) kecamatan dilayani oleh 1 orang ATR. 1 orang ATR mengawasi kinerja 2 orang PKB.

13) *Sterility control* (SC), ada 5 orang. Idealnya setiap puskseswan harus dilengkapi oleh 1 orang petugas SC.

14) *Recorder* IB, 1 orang

15) *Handling* semen beku, 1 orag

16) Penyuluh peternakan lapangan, tidak tersedianya penyuluh peternakan yang memadai dan sesuai kebutuhan lapangan.

b. Masih rendahnya mutu SDM Petugas Peternakan

c. Masih terbatasnya kualitas SDM Peternak.

2. Bidang Sumber Daya Alam (Lahan dan Komoditas Ternak)

a. lahan; permasalahan sumberdaya lahan peternakan di Pesisir Selatan adalah :

1) belum adanya lahan khusus yang diperuntukkan sebagai lahan usaha peternakan baik sebagai lahan penggembalaan umum, lahan untuk hijauan pakan ternak (HPT) dan lahan untuk perkandangan.

2) lahan untuk pengembangan usaha peternakan pada umumnya merupakan lahan marginal dan kurang produktif.

- 3) belum adanya lahan khusus untuk usaha peternakan. Akibatnya ketersediaan pakan sangat tidak mencukupi akibat mengandalkan pakan alami.
- b. Sumber daya genetik hewan; Pesisir Selatan memiliki sumber daya genetik berupa plasma nutfah sapi Pesisir dan itik Bayang. Namun belum diusahakan secara optimal dan belum mendapatkan perhatian secara serius sebagai komoditas unggulan daerah.
- c. Benih dan bibit ternak; sebagian besar benih atau bibit ternak didatangkan dari luar daerah, sehingga membutuhkan pembiayaan yang cukup besar. Daerah belum menyediakan pusat perbibitan yang dikelola dengan manajemen perbibitan (*good breeding practice*). Perbibitan yang ada masih dikelola dengan manajemen tradisional akibatnya belum mampu menyediakan ketersediaan bibit unggul (baik bibit sapi Pesisir maupun itik Bayang).
- d. Pakan unggas dan pakan hijauan; Pakan unggas yang banyak digunakan oleh masyarakat masih merupakan sumber pakan alami (dedak, bekicot, dan lainnya). Peternak belum sepenuhnya menggunakan pakan unggas yang memenuhi kadar nutrisi unggas sebagaimana standar pakan unggas. Sementara itu, sebagian besar pakan ternak sapi potong merupakan pakan hijauan yang berasal dari rumput alam yang secara teknis memiliki kandungan nutrisi dan

palabilitas yang lebih rendah dibandingkan pakan HMT unggul.

- e. Sumber daya air, pemenuhan kebutuhan air bersih masih disediakan secara tradisional dan belum tersedia setiap saat.

3. Teknologi Peternakan

- a. Inseminasi buatan telah diimplementasikan namun belum berhasil secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuantitas dan kualitas petugas, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan peternak dalam deteksi birahi dan akibat ternak belum dipelihara secara intensif.
- b. Teknologi pengolahan pakan ternak masih sangat sedikit diaplikasikan oleh masyarakat.
- c. Teknologi pengolah limbah peternakan menjadi pupuk organik dan bio gas belum dimanfaatkan secara optimal
- d. Teknologi pengolah produk peternakan (daging dan telur) masih bersifat tradisional.

4. Kelembagaan Peternakan

- a. Kelembagaan Teknis Peternakan belum berfungsi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga teknis peternakan, keterbatasan prasarana dan sarana, dan belum operasionalnya kelembagaan peternakan dilapangan akibat belum dikukuhkannya Puskesmas, Pusat Perbibitan, Pasar Ternak dan

Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebagai UPTD Peternakan.

- b. Kondisi usaha peternakan; Usaha peternakan sebagian besar merupakan usaha tradisional dan merupakan usaha sampingan
- c. Kawasan Usaha Peternakan; Pesisir Selatan belum mengoptimalkan peran kawasan usaha peternakan dalam pemberdayaan peternak. Pemberdayaan peternak memerlukan adanya kawasan usaha peternakan untuk menjamin kepastian usaha budidaya ternak. Kawasan usaha peternakan harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - 1) bebas dari patogen yang berbahaya bagi ternak dan manusia yang mengkonsumsi produk hewan;
 - 2) tersedia sumber daya air dan pakan yang memadai;
 - 3) tersedia prasarana berupa jalan, jembatan, pasar hewan, dan/atau embung; dan
 - 4) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang dan di bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan usaha peternakan dapat berupa kawasan agropolitan, kawasan perdesaan berbasis peternakan, kawasan integrasi ternak dengan komoditas lainnya, kawasan perbibitan itik, kawasan sapi potong, kawasan kerbau maupun kawasan sentra produksi ternak.

Peruntukan penggunaan kawasan peternakan adalah sebagai berikut :

- 1) lahan penggembalaan umum;
- 2) kegiatan usaha budidaya ternak;
- 3) penghasil tumbuhan pakan;
- 4) tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi, dan pelayanan inseminasi buatan;
- 5) tempat pelayanan Kesehatan Hewan; dan/atau
- 6) tempat atau objek penelitian dan pengembangan teknologi peternakan dan Kesehatan Hewan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

Berdasarkan Visi RPJMD Tahun 2016-2021 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis, dan Sejahtera”, maka ada tiga kata kunci yang menjadi fokus bahasan dalam pembangunan peternakan di masa mendatang, yaitu ;

1. Mandiri ;
2. Unggul
3. Sejahtera

Sementara itu, ada dua misi yang menjadi landasan dalam implementasi pembangunan peternakan, yaitu misi kedua dan misi keempat sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan misi RPJMD diatas, dari tiga tujuan misi tersebut, seluruh tujuan misi terkait langsung dengan pembangunan peternakan, yaitu :

- a. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis

Sesuai amanat Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2016, bahwa dalam mendorong pertumbuhan di desa dibuat mekanisme pembangunan kawasan perdesaan atau biasa disebut dengan istilah membangun desa. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kerjasama antar desa bisa membuat sebuah program pembangunan yang saling mensinergikan antar pihak agar terjadi percepatan desa membangun. Percepatan pembangunan ini meliputi peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Sehingga menjadi penting agar pembangunan berbasis kawasan perdesaan dapat menggabungkan pendekatan pembangunan dari level atas yaitu program-program pembangunan dari pusat atau daerah tanpa mengindahkan inisiatif dari level bawah yaitu partisipasi masyarakat untuk mengusulkan dan merancang pembangunan di kawasannya sendiri.

Prioritas Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbangunnya infrastruktur publik; adanya akses air bersih dan sanitasi; munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan

Melalui pembangunan kawasan pedesaan agropolitan peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah telah menentukan tujuan dan sasaran pembangunan kawasan melalui RPJMD, yaitu mengembangkan kawasan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggosari Baganti menjadi suatu kawasan terintegrasi sebagai pusat budidaya sapi potong dan pertanian terpadu, pengembangan teknologi dan pemasaran produk olahan sapi dan pengembangan daerah agribisnis terpadu; menyiapkan infrastruktur dasar dan pelayanan secara optimal melalui beberapa fungsi dan kelembagaan; dan mengintegrasikan sumber-sumber pembiayaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sasaran yang dicapai dari tujuan tersebut adalah mengoptimalkan pemanfaatan lahan dalam mengembangkan

budidaya sapi potong yang terintegrasi; meningkatkan nilai tambah produk unggulan kawasan; dan mengembangkan kemampuan pengembangan penguasaan teknologi kepada masyarakat dalam usaha dan pengolahan hasil peternakan.

Berdasarkan analisis yang bertumpu pada peluang pertumbuhan dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang terkait langsung dengan pembangunan peternakan adalah:

- (1) Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan; dan
 - (2) Kawasan Sentra Perdesaan berbasis Sapi Potong
- Khusus Kawasan Strategis Agropolitan Peternakan, secara administratif berada pada empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir dan Linggo Sari Baganti. Komoditi yang menjadi unggulan di empat wilayah tersebut adalah sapi potong. Upaya pemerintah sebagai langkah awal dalam mengembangkan kawasan agropolitan peternakan adalah dengan melengkapi beberapa sarana dan prasarana seperti pusat pembibitan ternak, gedung pelatihan peternak, pusat kesehatan hewan, pasar peternakan, dan sarana pendukung lainnya.

- b. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis kebencanaan.

Secara geologis Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah rawan terhadap gempa bumi dan tsunami. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatera sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir Sumatera yang saling berdesakan sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Kondisi tersebut menjadikan wilayah ini rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor dan gempa bumi yang berpotensi terjadinya gelombang air laut yang tinggi atau tsunami. Khusus di Kabupaten Pesisir Selatan bencana alam dan gempa bumi terjadi karena letak geografis daerah ini yang terletak pada pertemuan lempeng benua. Tanah longsor dan banjir lebih diakibatkan karena sifat fisik dan tutupan lahan seperti kawasan hutan yang semakin berkurang. Selama ini bencana alam menjadi kendala dalam upaya pengembangan kawasan budidaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

- c. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah secara terpadu dan konsisten

Keterkaitan perencanaan ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya agropolitan peternakan sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten yang

merupakan turunan dari RTRW Nasional dan Provinsi. Hal ini juga sudah diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten, dimana salah satu point prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis. Prioritas Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan pedesaan dan kawasan-kawasan potensial, yang memberikan nilai tambah kepada daerah baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Melalui prioritas tersebut diharapkan dapat mewujudkan terbangunnya infrastruktur publik; adanya akses air bersih dan sanitasi; munculnya kawasan strategis yang bernilai ekonomi; dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan.

2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan misi ini adalah;

- a. Penguatan agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup mesin, peralatan pertanian, pupuk, bibit dan lain-lain;
- b. Pengembangan usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha tanaman

pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan;

- c. Penguatan agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yang meliputi industri-industri pengolahan dan pemasarannya, termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor;
- d. Penguatan jasa-jasa penunjang dalam bentuk perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah; dan
- e. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

Berdasarkan misi tersebut, maka ada dua tujuan yang sangat terkait dengan pembangunan peternakan, yaitu;

- a. Mengembangkan Pertanian/Perkebunan/Peternakan serta Kelautan dan Perikanan yang produktif dan bernilai tinggi.

Sesuai dengan tujuan misi ini, maka pembangunan peternakan difokuskan pada upaya untuk mengembangkan peternakan yang produktif dan bernilai tinggi.

- b. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing, terutama untuk pengolahan hasil pertanian/perkebunan/perternakan serta perikanan dan kelautan.

Arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan mengembangkan daya saing pengolahan hasil peternakan antara lain:

- 1) Revitalisasi kelembagaan usaha peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk;
- 2) Pembangunan sentra pengolahan hasil peternakan;
- 3) Revitalisasi pasar ternak ;
- 4) Revitalisasi Tempat pemotongan hewan
- 5) Penyediaan produk peternakan yang aman, sehat, utuh dan halal
- 6) Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM; dan
- 7) Pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha peternakan.

Peningkatan daya saing peternakan dapat juga dilakukan dengan Pemberian kemudahan kepada Peternak, dalam hal ;

- 1) pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
- 2) pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik;
- 3) penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
- 4) pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;

- 5) penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau peningkatan kewirausahaan;
- 6) pengutamaan pemanfaatan sumber daya Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam negeri;
- 7) pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan Usaha Peternakan;
- 8) pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran; dan/atau
- 9) perlindungan harga dan Produk Hewan dari luar negeri.

Sementara berdasarkan program dalam RPJMD Tahun 2016-2021, program daerah yang menjadi landasan bagi program pembangunan peternakan adalah;

- a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- b. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- d. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- f. Program Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana Peternakan
- g. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian, Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

1. Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Visi Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 adalah “Terwujudnya system pertanian bio-industri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.

Sedangkan Misi Kementerian Pertanian yang diemban pada tahun 2015-2019 adalah ;

- a. Mewujudkan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan yang beragam dan sehat;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;
- c. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor produk pertanian;
- d. Mewujudkan usaha pertanian terintegrasi untuk menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan;
- e. Meningkatkan sistem usaha tani berkelanjutan melalui adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan sumberdaya genetik;

- f. Meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bio-industri;
- g. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan
- h. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019:

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian;
- b. Mewujudkan sistem pertanian bio-industri berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal;
- c. Menumbuhkembangkan diversifikasi pangan dan peningkatan gizi;
- d. Meningkatkan nilai tambah, daya saing, ekspor dan substitusi impor produk pertanian; dan
- e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Selama lima tahun ke depan, dalam membangun pertanian di Indonesia, sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu:

- b. Peningkatan ketahanan pangan;
- c. Peningkatan nilai tambah, daya saing, ekspor, dan substitusi impor;

- d. Penyediaan dan peningkatan bahan baku bio-industri dan bio-energi; dan
- e. Peningkatan kesejahteraan petani.

Guna mencapai visi dan menjalankan misi pembangunan pertanian, strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian selama periode 2015-2019 adalah:

- a. Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan;
- b. Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian;
- c. Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit;
- d. Penguatan kelembagaan petani;
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pertanian;
- f. Pengembangan dan penguatan bio-industri dan bio-energi
- g. Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian; dan
- h. Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi.

Kebijakan Umum Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan peningkatan swasembada beras dan peningkatan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai, dan bawang merah;
- b. Kebijakan pengembangan produk berdaya saing, ekspor, substitusi impor, serta bahan baku bio-industri;

- c. Kebijakan penguatan sistem dan kelembagaan perbenihan/pembibitan, petani, teknologi, penyuluhan, perkarantinaaan dan ketahanan pangan;
- d. Kebijakan pengembangan kawasan pertanian;
- e. Kebijakan fokus komoditas strategis;
- f. Kebijakan pengembangan sarana, infrastruktur dan agroindustry di perdesaan; dan
- g. Kebijakan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi.

Sedangkan Kebijakan Teknis Operasional Pembangunan Pertanian 2015-2019 terdiri dari:

- a. Kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penanganan pasca bencana alam serta perlindungan tanaman;
- b. Kebijakan re-orientasi multi produk pertanian;
- c. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan subsidi dan kredit pembiayaan usaha pertanian;
- d. Kebijakan pengelolaan program tematik mendukung pembangunan pertanian; dan
- e. Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.

Sejalan dengan kebijakan pembangunan pertanian Tahun 2015-2019, maka arah dan kebijakan Umum Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan nasional Tahun 2015-2019 diimplementasikan dalam bentuk

Sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2016-2019, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (th)			
			2016	2017	2018	2019
1	Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak	a. Produksi daging sapi kerbau (000 ton)	588,56	639,61	695	755
		b. Produksi telur (000 ton)	3.393,36	3.536,86	3.655	3.770
		c. Produksi susu (000 ton)	850,77	910,57	980,88	1.063,56
		d. Produksi daging kambing dan domba (000 ton)	116,97	119,50	122,11	124,81
		e. Produksi daging babi (000 ton)	354,97	375,80	398,09	421,7
		f. Produksi daging unggas (000 ton)	3.206,94	3.301,58	3.449,37	3.621,00
		g. Rasio volume ekspor terhadap pertanian strategis (%)	81,10	80,60	80,90	80,6
2	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan	h. Penurunan volume impor produk pertanian strategis (%)	-9,2	-18,90	-9,50	-2,9
		i. Volume ekspor ternak dan produk hewan (%)	3	5	5	5
		j. Investasi sub sektor peternakan PMA (%)	1	2	2	2,5
		k. Investasi sub sektor peternakan PMDN (%)	1	2	2,5	3
		l. Status Kesehatan Hewan	75	77	79	80
		m. Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan (%)	63,33	69,18	76,83	84,53
		n. PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp. Juta)	37,14	39,49	41,83	44,17
3	Meningkatkan Kesejahteraan Peternak	Nilai Tukar Peternak (NTP)	107,23	107,53	107,82	108,12

2. Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.

Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021:

Sumbar Pusat Pangan Asal Hewan di Sumatera Bagian Tengah

Visi tersebut mengandung kata kunci sbb:

Pusat Pangan Asal Hewan adalah

1. Sumatera Barat sebagai produsen ternak (Sapi Potong, kerbau, Kambing dan Unggas) di Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Bengkulu). Ternak unggas meliputi : Ayam Kampung, Itik, Ayam Ras Pedaging dan Ayam Ras Petelur
2. Pangan Asal Hewan adalah produk yang dihasilkan oleh ternak berupa daging, telur dan susu.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan Visi OPD. Rumusan Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal.
2. Mengembangkan produk peternakan unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas.

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

Penetapan tujuan dari organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kepada pernyataan misi yang telah dirumuskan. Tujuan akan menggambarkan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan dalam periode perencanaan dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun kedepan, tujuan yang ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta berdasarkan kepada isu-isu yang dapat mendorong pembangunan peternakan, tujuan yang telah dirumuskan adalah:

1. Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan.
2. Meningkatkan daya saing produk peternakan

Sasaran yang akan dicapai adalah

1. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan
2. Meningkatnya produktivitas ternak
3. Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan
4. Meningkatnya status kesehatan hewan
5. Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar higiene
6. Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	1. Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Ungga	%	1.22	1.33	1.44	1.55	1.66	1.75
			b. Peningkatan Populasi Ternak Sapi	%	1.60	1.80	1.80	1.80	2.00	2.00
		2. Meningkatnya produktivitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan (kawin) per kebuntingan)	%	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3
			b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi	%	15	15	20	20	25	25

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
		3. Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	a. Jumlah peternak yang memiliki registrasi farni di Sumatera Barat	KK	100	100	100	100	100	100
		4. Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	Kasus	0	0	0	0	0	0
			b. Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis	%	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1
2.	Meningkatkan daya saing produk peternakan	Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (Pelaku Usaha)	Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	9	11	13	15	17	19

B. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

dalam lima tahun mendatang. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menunjukkan bagaimana cara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Peternakan sebagaimana disajikan pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Sumbat Sebagai Penghasil Ternak Dan Hasil Ikutannya Utk Mewujudkan Kedaulatan Pangan Asal Ternak Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Peternak.			
MISI 1 : Menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi peternakan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak serta keamanan produk yang dihasilkan	Sasaran 1 Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	Intensifikasi kualitas peternakan meliputi komoditas, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana Melakukan transfer bio teknologi kepada masyarakat peternak melalui petugas teknis peternakan	Kebijakan 1. Peningkatan produksi dan produktivitas peternakan untuk meningkatkan surplus bahan pangan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri)
	Sasaran 2 Meningkatnya produktivitas ternak	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur peternakan;	Kebijakan 2 Revitalisasi sarana dan prasarana peternakan dan kesehatan hewan
	Sasaran 3 Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Mengembangkan kawasan peternakan berbasis komoditas strategis dan unggulan lokal yang berkelanjutan didukung penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Kebijakan 3 Penetapan kawasan sentra peternakan berdasarkan potensinya
	Sasaran 4 Meningkatnya status kesehatan hewan	Meningkatkan kapasitas SDM Peternak melalui pendidikan formal/bimtek/magang/in house training dan pembinaan	Kebijakan 4 Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia peternakan dan kesehatan hewan
	Sasaran 5 Meningkatnya unit usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	Meningkatkan ketersediaan pangan asal ternak yang ASUIII	Kebijakan 5 Peningkatan mutu produk peternakan yang aman dikonsumsi masyarakat yang memenuhi standar kesmavet, kesrawan dan kesehatan hewan
MISI 2 : Mengembangkan produk peternak unggulan yang berdaya saing menghadapi era persaingan bebas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan daya saing produk peternakan	Peningkatan jumlah pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil ternak	Meningkatkan usaha penanganan pasca-panen, dan pengolahan hasil peternakan Mengembangkan jaringan pemasaran dan informasi pasar	Kebijakan 1. Peningkatan kualitas pengolahan hasil peternakan Kebijakan 2. Melakukan kontrol terhadap sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil ternak

3. *Telaahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan*

Pembangunan sub sector peternakan sebagai salah satu komoditas unggulan daerah diperlukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan peternak.

Sub sektor peternakan merupakan salah satu komoditi daerah yang berperan penting dalam peningkatan pendapatan keluarga, sebagai pembentuk PDRB, dan berperan dalam investasi masyarakat.

Dalam rangka mendorong percepatan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pembangunan sub sektor peternakan, dan sejalan dengan program prioritas RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, maka pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan diarahkan untuk ;

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak
- b. Peningkatan populasi ternak
- c. Penguatan kelembagaan Peternakan (Puskeswan, Pusat Perbibitan dan Pengembangan Ternak, pasar Ternak, Tempat Pemotongan Hewan dan Pos IB)
- d. Peningkatan SDM Peternakan
- e. Penumbuhan, pembangunan, pengembangan dan revitalisasi Kawasan Peternakan
- f. Penumbuhan dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak (daging dan telur) dan hasil sampingan ternak

g. Pemanfaatan limbah peternakan sebagai bahan pupuk organik dan sumber energy bagi keluarga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang maka peraturan daerah tentang RTRW perlu dilakukan penyesuaian penataan ruang kabupaten sesuai dengan peruntukannya. Hal prinsip yang perlu disesuaikan adalah perlu penekanan pola insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang, penerapan sanksi, proporsi kawasan lindung dalam daerah aliran sungai (DAS) dan ruang terbuka hijau masing-masing paling sedikit 30 persen, serta perlunya *zoning regulation* pada kawasan-kawasan strategis, sebagaimana juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang didalamnya telah menetapkan struktur ruang yang mengatur sistem perkotaan nasional dan penetapan Kawasan Strategis Nasional. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan tujuan penataan ruang daerahnya yaitu mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Tujuan penataan ruang daerah tersebut dapat dicapai dengan membuat rencana strategis kawasan atau menetapkan kawasan strategis di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Kawasan strategi merupakan kawasan yang pengembangannya diprioritaskan. Kawasan strategi tersebut meliputi kawasan strategi yang didasari oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); kawasan strategi provinsi yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemerintah provinsi; dan kawasan strategi kabupaten yang merupakan hasil perumusan dan kesepakatan pemerintah kabupaten/kota. Sebagai acuan dalam penentuan kawasan strategis telah dikeluarkan beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis kabupaten kecuali kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan terbatas. Kawasan strategis lain yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah antara lain kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; kawasan strategis sosial budaya; kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta fungsi dan daya dukung lingkungan. Penetapan kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;

3. Memiliki potensi ekspor;
4. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
5. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
6. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
7. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; dan
8. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal

Berdasarkan hal-hal tersebut maka keterkaitan perencanaan ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya agropolitan peternakan sudah sesuai dengan RTRW Kabupaten yang merupakan turunan dari RTRW Nasional dan Provinsi. Hal ini juga sudah diterjemahkan dalam RPJMD Kabupaten, dimana salah satu point prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pembangunan Peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan

1. Isu – isu dalam Pembangunan Sektor Peternakan

- a. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang cukup pesat (0,86 % per tahun), dengan konsentrasi tempat tinggal penduduk sebagian besar berada di pedesaan.
- b. Sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja di sektor Pertanian (80.488 orang atau 47.92% dari jumlah penduduk).
- c. Produktivitas ternak sapi potong yang rendah (dengan berat karkas ± 135 kg/ekor) bandingkan dengan berat karkas sapi potong di daerah lain ± 180 kg/ekor (data statistik peternakan propinsi)
- d. Perbaikan mutu genetika melalui IB belum optimal
- e. Masih belum adanya industri pengolahan hasil peternakan
- f. Masih adanya ancaman penyakit hewan menular (flu burung, SE/ngorok, rabies dan jembrana) yang merupakan penyakit endemis
- g. Masih tingginya angka penjualan dan pemotongan betina produktif
- h. Puskesmas belum berbentuk UPTD akibatnya belum dapat melakukan pelayanan secara optimal kepada masyarakat
- i. Masih ada usaha peternakan yang belum sesuai aspek lingkungan

2. Permasalahan

- a. *Populasi sapi di Pesisir Selatan didominasi oleh sapi pesisir yang berbadan kecil akibat terjadinya inbreeding dan pemeliharaan yang sebagian besar masih ekstensif.*
- b. *Usaha ternak masyarakat masih berskala kecil, umumnya memelihara ternak sebagai usaha tambahan.*
- c. *Sebagian pemeliharaan ternak masih menggunakan sistem tradisional yaitu banyak yang dilepas tanpa dikandangkan, walaupun banyak juga yang melepaskan disiang hari dan mengandangkan di malam hari.*
- d. *Kurangnya sumber daya manusia peternakan (medis paramedis, Sterility Control, Asisten Teknis Reproduksi, Pemeriksa Kebuntingan, inseminator dan penyuluh peternakan) baik dari segi kuantitas maupun kualitas*
- e. *Belum cukupnya jumlah pasar ternak jika dilihat dari kondisi daerah Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke Selatan*
- f. *Kurangnya ketersediaan bibit hijauan makanan ternak untuk mendukung pengembangan usaha peternakan rakyat.*
- g. *Kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan subsektor peternakan masih rendah.*
- h. *Terbatasnya sarana prasarana pendukung peternakan (Puskesmas, pasar ternak, tempat pemotongan hewan, dan lain-lain)*

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

A. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pembangunan Bupati Pesisir Selatan khususnya misi 4 yaitu Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan, maka dirumuskanlah tujuan jangka menengah pembangunan peternakan dan kesehatan hewan kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut : Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis

Tabel 3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Target Kinerja	Target
1.	Meningkatkan nilai produksi peternakan	persentase peningkatan produksi daging persentase peningkatan produksi telur	2,11 3,73
2.	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1,5

Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	
1	Meningkatkan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan	Meningkatkan nilai produksi peternakan	1.1 Peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan yang berdaya saing a. Persentase peningkatan produksi daging. b. Persentase	a. Persentase peningkatan produksi daging. b. Persentase peningkatan produksi telur	2,11 3,73	2,11 3,73	

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		KET
	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	
			peningkatan produksi telur				
2	Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dibidang peternakan dan kesehatan hewan	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	2.1 Jumlah akseptor IB yang dilayani Jumlah puskesmas punya tenaga medis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	5000 5	1,5	

Dari revisi yang telah dilakukan maka Rincian penetapan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2016 sebagai tertuang dalam Tabel. 4

Tabel. 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Perjanjian Kinerja Tahun 2017)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KET.
1.	Meningkatkan nilai produksi peternakan	a. Persentase peningkatan produksi daging. b. Persentase peningkatan produksi telur	2,11 3,5	
	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1,5	

Indikator Kinerja Tujuan

Daftar Target Kinerja Tujuan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan
Dari Tahun 2016 s/d 2021

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2015	Target kinerja setiap tahun						Total Pertama bahan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Terwujudnya peningkatan produksi dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis									
1	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan									
	a. Persentase peningkatan produksi daging	%	2	2,05	2,11	2,12	2,15	2,18	2,21	10,79
	b. Persentase peningkatan produksi telur	%	3,5	3,5	3,73	3,74	3,75	3,81	3,83	19,52
2	Persentase Pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis		1	1	1,5	2.0	2,5	3.0	3,5	3,5

RENCANA STRATEGIS | 2016-2021

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B. Arah dan Prioritas Kebijakan

Mengacu kepada Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020 yaitu “Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan” serta konsep dasar Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di kabupaten Pesisir Selatan dimasa yang akan datang diarahkan pada upaya terciptanya nilai tambah dan daya saing, sehingga usaha peternakan di kabupaten Pesisir Selatan dimasa akan datang mampu bersaing dengan hasil produksi dari daerah lain yang bermuara kepada peningkatan perekonomian masyarakat.

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai arah pembangunan peternakan untuk masa yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan.
- b. Mengembangkan teknologi usaha peternakan.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia peternakan di bidang agribisnis.

- d. Meningkatkan sistem penyuluhan Peternakan yang berorientasi peningkatan kemampuan petani ternak dalam pengembangan usaha dan penerapan inovasi dan teknologi baru
- e. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Peternakan.
- f. Penanggulangan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

C. Sasaran Yang Ingin Dicapai 2016 - 2021

Sasaran yang akan dicapai dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Peternakan di Kabupaten Pesisir Selatan terangkum dalam sasaran strategis yang memuat program/ kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Meningkatkan nilai Produksi peternakan
2. Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis

Secara umum sasaran akhir dari pembangunan sektor pertanian adalah pertumbuhan sektor pertanian rata-

rata 1,5 persen per tahun dalam tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk lebih jelasnya sasaran strategis dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan seperti tabel dibawah ini :

*Tabel 5. Daftar Target Capaian Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Pesisir Selatan Dari Tahun 2016 s/d 2021*

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra 2015	Target capaian setiap tahun						Total Pertama bahan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
I	Meningkatkan nilai Produksi peternakan									
1	Persentase peningkatan produksi daging	%	2	2,05	2,11	2,12	2,15	2,18	2,21	12.82
2	Persentase peningkatan produksi telur	%	3,5	3,5	3,73	3,74	3,75	3,81	3,83	22.36
II	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis									
1	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	%	1	1	1,5	2.0	2,5	3.0	3,5	3,5

4.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maka strategi dan kebijakan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi ternak melalui program Inseminasi Buatan
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peternakan melalui pelatihan, sekolah lapang, dan sosialisasi teknologi
4. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral
5. Meningkatkan sarana prasarana penunjang sektor peternakan dan kesehatan hewan
6. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna
7. Meningkatkan akses informasi terhadap masyarakat

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program dan Kegiatan (Prioritas Wilayah)

Pengembangan wilayah merupakan upaya membangun dan mengembangkan suatu wilayah berdasarkan pendekatan spasial dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, ekonomi, lingkungan fisik, dan kelembagaan dalam suatu kerangka perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang terpadu. Sedangkan pembangunan merupakan suatu upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanitis.

Dalam pengembangan suatu wilayah ada berbagai konsep yang digunakan, seperti konsep pengembangan wilayah agropolitan, megapolitan, growth pole, minapolitan, dan lain sebagainya. Konsep-konsep pengembangan wilayah tersebut dapat digolongkan sebagai konsep pengembangan wilayah basis ekonomi, ekologi, sosial, dan teknologi. Salah satu konsep pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi adalah konsep pengembangan kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan disini diartikan sebagai sistem fungsional wilayah kawasan yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan yakni dengan adanya pusat agropolitan dan wilayah di sekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan juga dicirikan sebagai kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena

berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 yaitu *Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah dengan tetap Mengedepankan Pembangunan Berkelanjutan*. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa wisata yang berdaya saing melalui peran koperasi, UMKM dan industri. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu strateginya adalah dengan mengembangkan kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dengan menerapkan teknologi tepat guna.

Dari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 dinyatakan bahwa untuk meningkatkan produksi dan nilai tambah usaha peternakan dilakukan dengan strategi mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan. Pengembangan usaha peternakan di dalam satu kawasan, tidak saja sebagai pendekatan baru dalam pembangunan tetapi dapat dijadikan sebagai penggerak utama peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan :

1. Sub-sektor peternakan termasuk penyumbang terbesar dalam PDRB sektor pertanian (40,55%) dari PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Sub-sektor peternakan merupakan sub-sektor utama perekonomian masyarakat, baik dalam bentuk tabungan untuk biaya sekolah, pembangunan rumah, maupun sebagai sumber biaya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.
3. Permintaan pasar yang cukup besar terhadap sapi pesisir, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan Sapi Qurban (sekitar 8000 ekor per musim).
4. Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai sentra produksi sapi dan ayam buras.

Disamping itu, pendekatan pembangunan peternakan dewasa ini menggunakan pendekatan kawasan. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pengembangan peternakan dengan pendekatan kawasan dengan maksud untuk menghindari tumpang tindih antar kegiatan dan eksternalitas negatif, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan jasa penunjang. Dengan pendekatan kawasan, keterkaitan antar komoditas akan lebih mudah terjalin sehingga akan menjamin keberlanjutan kegiatan pra-produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis. Terhimpunnya sumber daya manusia yang terampil dalam suatu kawasan juga akan memudahkan dalam pembinaan dan peningkatan keterampilannya, serta dalam monitoring, pengawasan dan evaluasi.

Selama ini, pola pengembangan peternakan yang diterapkan masyarakat (peternak) tidak terfokus di lokasi

potensial dan tidak terintegrasi. Lokasi pengembangan peternakan selama ini terpecah demi azas pemerataan. Skala usahanya kecil-kecil, sehingga untuk mendapatkan dukungan berbagai komponen baik itu infrastruktur, sumberdaya manusia, kelembagaan maupun komponen penunjang lain menjadi kurang efisien. Sementara itu, pengembangan peternakan yang berbasis kawasan adalah suatu pola pengembangan yang mempunyai prinsip berada dalam satu manajemen lokasi (area), penguatan pelayanan (teknis dan pembiayaan), penguatan kelembagaan, kemandirian usaha dan daya saing, peningkatan kualitas SDM dan pendidikan, integrasi kegiatan dan kewenangan, pendampingan stakeholder serta diversifikasi produk.

Pendekatan kawasan ini dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan produksi komoditas unggulan. Dalam suatu kawasan peternakan akan terdapat sarana-prasarana pelayanan teknis budidaya, sarana-prasarana pelayanan pembiayaan, sarana-prasarana pelayanan pendidikan/pelatihan, sarana-prasarana pelayanan pemasaran, sarana-prasarana pelayanan kesehatan ternak, dan sarana-prasarana pengolahan hasil ternak. Dengan demikian diharapkan hasil yang lebih baik dalam usaha peternakan.

Guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan peternakan, disusun strategi program dan strategi kegiatan melalui pengembangan kawasan Sentra Peternakan Rakyat. Pengwilayahan komoditi ini disesuaikan dengan topografi Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dari Utara ke

Selatan. Adapun kawasan pengembangan tersebut lokasinya disesuaikan dengan potensi wilayah masing – masing dilihat dari tujuh indikator utama yaitu :

- a. Basis biomassa pakan
- b. Jumlah populasi
- c. Sosial budaya (culture)
- d. Kelembagaan dan jumlah rumah tangga peternak
- e. Regulasi
- f. Konektifitas produsen dan konsumen
- g. Harus sesuai dengan kebijakan daerah

Masing–masing kawasan pengembangan memuat strategi program dan kegiatan yang di danai dari berbagai sumber.

A. Program dan Kegiatan pada Kawasan Pengembangan (KP)

No	Sektor Andalan	Strategi Program	Strategi Kegiatan
I	Kawasan Peternakan		
	a. Kawasan pengembangan sapi potong	Peningkatan populasi sapi potong	Ketersediaan bibit unggul sapi potong
	b. Kawasan pengembangan ternak unggas	Pengembangan pendukung ekonomi rakyat	Ketersediaan bibit unggul ternak unggas
	c. Kawasan agropolitan	Pengembangan ternak di kawasan agropolitan	Ketersediaan bibit unggul sapi potong dan Hijauan

			Makanan Ternak (HMT)
	d. Kawasan integrasi sawit – ternak	Pemanfaatan kebun sawit rakyat secara optimal	Pendistribusian sapi potong pada kebun sawit rakyat

B. Program dan Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan

Program pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan bagian integral pembangunan pertanian pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha-usaha peternakan, sehingga memiliki nilai tambah, daya saing dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat peternakan.

Dengan adanya perubahan uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan revisi terhadap judul kegiatan, serta penempatan kegiatan pada program yang sesuai.

Program yang tertuang dalam belanja pokok (non urusan) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Pokok :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 6. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 8. Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan
 9. Penyediaan Makanan dan Minuman
 10. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pokok :
1. Pengadaan Meubeleur
 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 3. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Pokok :

- ### 1. Pendidikan dan Pelatihan formal

Kegiatan Pokok :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Kegiatan Pokok :

1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular ternak
2. Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit Endemik
3. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar daerah.
4. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda Rabies

6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Pembibitan dan Perawatan Ternak
2. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak
3. Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB
4. Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan
5. Budidaya Itik Bayang
6. Budi daya ayam local
7. Penyusunan Action Plan Pengembangan Kawasan
8. Pengembangan Ternak untuk Menunjang Percepatan Pembangunan

7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Ternak

Kegiatan Pokok :

1. Promosi atas hasil Produksi Peternakan Unggulan daerah

8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Penerapan Teknologi Peternakan

9. Program Peningkatan Agribisnis Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau.

10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan

Kegiatan Pokok :

1. Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Mendukung Peternakan.

Program utama pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

No	Program	Sasaran Kegiatan
1.	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2. Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 3. Terpantaunya lalu lintas ternak keluar dan masuk daerah 4. Penambahan poskeswan/klinik hewan
2.	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Tersedianya bibit ternak lokal dan unggul 2. Tersedianya vaksin dan pakan ternak kepada petugas medis

		dan paramedis 3. Meningkatnya populasi ternak melalui IB (Inseminasi Buatan) 4. Peningkatan kelembagaan dan usaha peternakan 5. Peningkatan Sarana tempat pemotongan hewan
3.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1. Terlaksananya promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah 2. Penumbuhan sarana pasar ternak
4	Peningkatan Sarana Prasarana Peternakan	1. Terlaksananya pembangunan dan rehab sarana prasarana peternakan 2. Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung usaha peternakan di kelompok tani ternak

B. Program Nasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Program	Sasaran Kegiatan
1.	Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan	1. Meningkatkan produksi pangann asal ternak

	Agribisnis Peternakan Rakyat	2. Meningkatkan daya saing peternakan 3. Meningkatkan kesejahteraan peternak
--	------------------------------	--

5.2. Pendanaan Indikatif

Untuk pendanaan indikatif rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada Matrik Pendanaan sebagai berikut .

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET PENCAPAIAN PROGRAM (VOLUME)						PAGU INDIKATIF (Rp.)						TOTAL
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	12	13	14	15	16	
A	APBD									1,770,000,000	3,681,120,000	5,465,982,000	5,377,217,700	5,818,838,845	6,315,543,073	24,427,825,137
VI	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK									570,000,000	602,000,000	635,950,000	671,982,500	710,240,125	750,876,481	3,190,172,625
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Terlaksananya operasional petugas medis dan paramedis untuk vaksinasi	dosis	8,000	8,400	8,820	9,261	9,724	10,210	300,000,000	315,000,000	330,750,000	347,287,500	364,651,875	382,884,469	2,040,573,844
2	Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik	Terlaksananya eliminasi anjing liar	ekor	5,000	5,250	5,513	5,788	6,078	6,381	200,000,000	210,000,000	220,500,000	231,525,000	243,101,250	255,256,313	1,360,382,563
3	Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terlaksananya pengawasan keamanan bahan pangan asal hewan dan pengawasan lalu lintas ternak	bulan	12	12	12	12	12	12	70,000,000	77,000,000	84,700,000	93,170,000	102,487,000	112,735,700	540,092,700
4																
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN									1,100,000,000	2,759,120,000	4,086,032,000	3,932,435,200	4,301,238,720	4,715,834,592	17,644,660,512
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak	Terlaksananya pemeliharaan ternak sapi di Pusat Perbibitan dan Pengembangan Peternakan (P4)	bulan	12	12	12	12	12	12	200,000,000	240,000,000	288,000,000	345,600,000	414,720,000	497,664,000	1,985,984,000
2	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada KK miskin	KK miskin	-	80	90	100	110	120	-	1,200,000,000	1,350,000,000	1,500,000,000	1,650,000,000	1,800,000,000	7,500,000,000
3	Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	Terlaksananya pembelian vaksin	dosis	10,000	10,000	11,000	12,100	13,310	14,641	200,000,000	220,000,000	242,000,000	266,200,000	292,820,000	322,102,000	1,543,122,000
4	Peningkatan Mutu Genetik Melalui IB	- tersedianya bibit/semen beku	dosis	5,000	9,614	10,575	11,633	12,796	14,076	400,000,000	769,120,000	846,032,000	930,635,200	1,023,698,720	1,126,068,592	5,095,554,512
		- tersedianya N2 cair	liter	5,000	5,500	6,000	6,500	7,000	7,500	100,000,000	110,000,000	120,000,000	130,000,000	140,000,000	150,000,000	
5	Pemberdayaan Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Terlaksananya pelatihan manajemen agribisnis, budidaya dan teknologi peternakan kepada petani ternak	orang	100	110	120	130	140	160	200,000,000	220,000,000	240,000,000	260,000,000	280,000,000	320,000,000	1,520,000,000
6	Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan	Tersedianya prasarana/ sarana peternakan yang layak														
		1. Puskesmas	unit	6	6	6	6	6	6	-	-	500,000,000				
		2. Rumah Potong Hewan	Unit	1	1	1	1	1	1	-	-	-	500,000,000			
		3. Pasar Ternak	Unit	1	1	1	1	1	1	-	-	500,000,000				
		4. Laboratorium Keswan	Unit	-	1	1	2	2	2	-	-	-	-	500,000,000		
		5. Laboratorium Kemavet	Unit	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-		500,000,000	
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI TERNAK									100,000,000	320,000,000	744,000,000	772,800,000	807,360,000	848,832,000	3,592,992,000
1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	terlaksananya bulan bakti peternakan tingkat propinsi	kali	1	1	1	1	1	1	100,000,000	120,000,000	144,000,000	172,800,000	207,360,000	248,832,000	992,992,000
2	Pembinaan usaha industri pengolahan hasil peternakan															
3	Revitalisasi Pasar Ternak Lengayang	Termanfaatkannya pasar ternak Lengayang sebagai pusat pelelangan ternak di Pesisir Selatan	unit	-	1	1	1	1	1	-	100,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	2,100,000,000
4	Pengembangan Pasar Daging Hygienes	Tersedianya los pasar daging yang hygienes	Unit	-	1	1	1	1	1	-	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	500,000,000
B.	APBN									1,513,000,000	1,913,500,000	2,544,000,000	2,934,500,000	3,205,000,000	3,620,500,000	12,860,000,000

RENCANA STRATEGIS 2016-2021

IV	Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal									1.223.000.000	1.623.500.000	2.034.000.000	2.424.500.000	2.695.000.000	3.110.500.000	10.750.000.000
1	Pejantan Pemacek	Tersedianya Pejantan unggul untuk meningkatkan mutu genetik	ekor	50	50	50	50	50	50	450.000,000	480.000,000	500.000,000	520.000,000	540.000,000	750.000,000	3.240.000,000
2	Penguatan Sapi/ Kerbau Betina Produktif	Terlaksananya pemberian insentif kepada peternak yang memiliki sapi/ kerbau betina produktif	insentif	400	450	500	550	600	650	240.000,000	270.000,000	300.000,000	330.000,000	360.000,000	500.000,000	1.500.000,000
3	Pengembangan sapi potong/ kerbau	Tumbuh dan berkembangnya kawasan ternak sapi potong dan kerbau	ekor	20	40	80	100	120	140	140.000,000	280.000,000	560.000,000	700.000,000	840.000,000	750.000,000	2.520.000,000
4	Pembibitan sapi potong	Tersedianya bibit sapi potong melalui budidaya oleh petani ternak	ekor	10	15	20	25	30	35	110.000,000	165.000,000	220.000,000	275.000,000	330.000,000	400.000,000	1.100.000,000
5	Pengembangan budidaya puyuh	Bertambahnya pendapatan petani ternak melalui budidaya ternak puyuh	ekor	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	35.000,000	52.500,000	70.000,000	87.500,000	105.000,000	122.500,000	350.000,000
6	Gerakan Pensejahteraan Petani (GPP)	Pemberdayaan ekonomi petani melalui pengembangan sapi bali	ekor	10	15	15	20	20	20	120.000,000	180.000,000	180.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	960.000,000
7	Gerakan Peningkatan Ekonomi Nelayan (GEPEMP)	Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui pengembangan sapi	ekor	10	15	15	20	20	25	120.000,000	180.000,000	180.000,000	240.000,000	240.000,000	300.000,000	960.000,000
8	Gerakan Menanam Rumput Serentak (Gemarampak)	Terlaksananya penanaman rumput serentak untuk pakan ternak	Ha	2	4	6	8	10	12	8.000,000	16.000,000	24.000,000	32.000,000	40.000,000	48.000,000	120.000,000
V	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Peternakan (Satker 08 Peternakan)									290.000.000	290.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	510.000.000	2.110.000.000
1	Perluasan areal peternakan (HMT)	Tersedianya cadangan pakan ternak dengan perluasan Hijauan Makanan Ternak	Ha	10	10	10	10	10	10	70.000,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000	70.000,000	350.000,000
2	Pengembangan sumber air (sumur dangkal)	Tersedianya cadangan air dengan pembangunan embung	Paket	2	2	4	4	4	4	120.000,000	120.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	240.000,000	960.000,000
3	Pengembangan Jalan Usaha		Km	1	1	2	2	2	2	100.000,000	100.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	200.000,000	800.000,000
JUMLAH										3.283.000.000	5.594.620.000	8.009.982.000	8.311.717.700	9.023.838.845	9.936.043.073	37.287.825.137

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 memuat indicator kinerja yang harus dicapai setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai OPD pelaksana urusan pilihan bidang pertanian sub sector peternakan diberikan target indicator kinerja utama sebagaimana berikut;

Tabel 6. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan.

N	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2015)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan nilai Produksi peternakan								
	Persentase peningkatan produksi daging	2	2.05	2.11	2.12	2.15	2.18	2.21	2,21
	Persentase peningkatan produksi telur	3,5	3.5	3.73	3.74	3.75	3.81	3.83	3,83
2	Menurunnya kejadian penyakit hewan menular dan zoonosis								
	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis	1	1	1,5	2.0	2,5	3.0	3,5	3,5

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Penjabaran Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan secara operasional dilaksanakan dan dimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Pembiayaan pembangunan peternakan dialokasikan berdasarkan prioritas program yang masuk dalam dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Selatan.

Secara operasional program dan kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan perencanaan anggaran, pembiayaan dan pelaksanaan anggaran.

- 1. Pembangunan Kawasan akan dilaksanakan dengan mekanisme kajian teknis dan analisis empiris ditetapkan dengan Keputusan Bupati*
- 2. Implementasi program dan kegiatan Inseminasi buatan akan dioperasionalkan secara teknis melalui petugas medis veteriner, paramedis veteriner, inseminator, vaksinator dan penyuluh peternakan*
- 3. Implementasi program dan kegiatan penanganan kesehatan hewan akan dioperasionalkan secara teknis melalui petugas medis veteriner, paramedis veteriner, vaksinator dan petugas ceck point.*
- 4. Implementasi program dan kegiatan penyuluhan dan pemebrdayaan kelompok tani ternak dilaksanakan melalui petugas teknis peternakan kecamatan*

5. Implementasi pengembangan sarana dan prasarana peternakan dilaksanakan melalui mekanisme musrenbang, pengusulan proposal oleh kelompok tani ternak, dan pokok-pokok pikiran anggota DPRD.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021, merupakan pedoman bagi jajaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mengimplementasikan tahapan pembangunan peternakan secara berkelanjutan.

Penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan mengacu pada RPJMD, yang disinergikan dengan Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, serta berdasarkan analisis teknis dan empiris potensi peternakan, potensi kawasan dan kesesuaian dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Proses penyusunan dokumen rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2016-2021 dilakukan dengan melakukan pengkajian dan analisis data lapangan secara komprehensif dan mendalam serta ditunjang dengan berbagai sumber kepustakaan yang kredibel. Harapannya adalah, Renstra tidak saja sebagai dokumen perencanaan, namun secara praktis dapat langsung diterapkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan baik tingkat kabupaten maupun petugas lapangan. Selain itu, Renstra ini semoga dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan alokasi pembiayaan pembangunan peternakan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Akhirnya, semoga Renstra ini memberikan faedah bagi semua pihak. Aamiin.

Painan, 12 Nopember 2017



Drh. Hj. HAZRITA, MM
NIP. 19590613 198603 2 001